

**NILAI-NILAI LUHUR DALAM AL-QUR'AN DAN KEARIFAN
LOKAL BUGIS SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN GOOD
GOVERNANCE DI INDONESIA**

Muhammad Yusuf

UIN Alauddin Makassar

E-mail: *muh.yusuf1274@gmail.com*

Abstract

This paper discloses the view concerning the urgency of values of Islamic teaching and values of local wisdom of Bugis people in constructing the system of good governance in Indonesia. Based on what al-Qur'an has insisted that the positive and effective change must be begun from the inner side of awareness and should be done collectively whether in the structural or cultural basis. Inner change encompasses two elements, mindset and knowledge, in such a way the internalization of glorious values from the al-Qur'anic teaching must be done in the self of each individual and, furthermore, enable to make good social life and good governance as well. This kind of internalization of glorious values also showed in local wisdom of Bugis which is implied in the concept of "ade". According to Bugis people, ade' is an essence of human being, since it is a reason why a man is named as human being. For Bugis people, ade' is a value. The ethical codes and values are called pangngadereng. There is a number of Local wisdom and values in the ethnic of Bugis, namely: lempu', amaccang, agettengeng, asitinajang, and reso which must be internalized and applied in this life then, in further way, have direct implication for good social life and also for good governance. By means of comparative-descriptive method, this paper attempts to portrait these two points of view and hopefully it can show the conformity between them with respect to glorious values and wisdom.

Keywords: *Glorious values, local wisdom, ethnic of Bugis, good governance, internalization.*

Abstrak

Tulisan ini menyingkap pandangan tentang urgensi nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal masyarakat Bugis dalam membentuk sistem pemerintahan yang *good governance* di Indonesia. Berdasarkan petunjuk al-Qur'an, perubahan poistif yang efektif harus dimulai dari "sisi dalam" berupa kesadaran dan dilakukan secara kolektif baik secara struktural maupun secara kultural. Perubahan dari dalam mencakup *mindset* dan pengetahuan, sehingga internalisasi nilai-nilai luhur mutlak dilakukan baik dalam pendidikan maupun birokrasi. Internalisasi nilai-nilai tersebut juga ditemukan dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis yang tersimpul dalam konsep *ade'*. Bagi masyarakat Bugis bahwa *ade'* sebagai esensi manusia, sebab *ade'* itulah yang menyebabkan seseorang disebut manusia. *Ade'* bagi orang Bugis itu adalah tata nilai. Aturan-aturan dan tata nilai itu disebut *pangngaderreng*. Nilai-nilai kearifan lokal berupa *lemphu'*, *amaccang*, *agetengeng*, *asitinajang*, dan *reso* adalah bagian dari nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diejawantahkan dalam kehidupan dan pada tahap selanjutnya dapat berimplikasi langsung dalam konteks sistem pemerintahan dan birokrasi. Melalui metode komparatif-deskriptif, tulisan ini berupaya memotret pandangan kedua sumber tersebut dengan harapan dapat menunjukkan keselarasan ajaran keduanya dalam nilai-nilai luhur.

Kata-kata Kunci: Nilai-nilai luhur, kearifan lokal, etnis Bugis, *good governance*, internalisasi.

Pendahuluan

Analisis terhadap permasalahan sistem pemerintahan yang baik, khususnya di Indonesia, melalui pendekatan agama adalah hal yang wajar karena mengingat Indonesia adalah sebuah pemerintahan yang berlandaskan pada nilai keagamaan, yaitu ketuhanan, sesuai dengan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula halnya jika melihatnya dari pendekatan budaya adalah hal yang wajar pula, sebab keragaman budaya diakomodir dalam semboyan bangsa, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Menafikan agama atau nilai budaya tertentu itu bagian dari bentuk menafikan asas nilai keagamaan dan nilai keragaman serta kebhinekaan.

Agenda besar Presiden RI, Joko Widodo untuk melakukan "revolusi mental" menunjukkan adanya sikap mental bangsa selama ini yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa meniscayakan agama sebagai landasan revolusi

mental bangsa. Sedangkan Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu semboyan bangsa yang mengakui eksistensi keragaman sebagai sesuatu yang mesti diterima, mencakup keragaman agama, etnis atau suku, budaya, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus menghormati setiap *local value*¹, sebab Indonesia memiliki karakter keragaman yang khas, memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan ke-Indonesiaan yang sesungguhnya.

Nilai-nilai luhur yang ada dalam al-Qur'an dan kearifan lokal yang sejak dahulu ada dan dirawat oleh nenek moyang kita kini telah tergerus oleh arus modernisasi dan gaya hidup moderen yang tidak sesuai dengan tradisi leluhur, misalnya kecenderungan terhadap gaya hidup konsumtif dan pola pikir yang materialistik. Hal ini tidak saja berdampak pada kehidupan sosial masyarakat pada umumnya, tetapi juga pada tata laksana dan kelola bangsa dalam sistem pemerintahan.

¹Andi Faisal Bakti, "Kita Harus Menghormati Local Value, Khazanah Islam Nusantara: Rekam Jejak

Dialektika Islam dan *Local Value*," *Jurnal Bimas Islam* 2, no. 1 (2009), 30.

Dengan sistem politik demokrasi, di satu sisi, sesungguhnya pemerintahan Indonesia mengakomodir kebebasan dan persamaan hak dalam ikut serta mengelola negara, namun di sisi lain, tidak jarang para pengelola negara baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif menyalahgunakan kebebasan dan hak atau wewenang yang telah diamanahkan oleh konstitusi dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma bernegara. Diantara yang terbesar dan terpopuler dari pelanggaran tersebut adalah kejahatan korupsi, arogansi kekuasaan atau *abuse of power* dari para pemangku jabatan, dan lain sebagainya yang telah menjauhkan Indonesia dari criteria negara yang bersifat *good governance*. Semua pelanggaran tersebut jika dicermati berpangkal dari rendahnya kesadaran dan integritas diri para penyelenggara negara yang ditopang oleh nilai-nilai luhur moral. Kegelisahan bangsa atas hilangnya perilaku jujur, amanah, disiplin, visioner, kerja-keras, dan nilai-nilai luhur lainnya yang telah membuat keroposnya mental bangsa hingga mencapai kulminasi yang tinggi.

Hasil survei LSI pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa mayoritas publik (51,5%) sudah tidak percaya dengan perilaku moral elit politik. Menurut temuan LSI tersebut, paling tidak ada tiga faktor yang turut memupuk tumbuhnya ketidakpercayaan publik tersebut, yakni 1) minimnya elit politik yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat; 2) kebiasaan hipokrit elit politik, yakni berbeda antara ucapan dan perbuatan; dan 3) semakin berjaraknya perilaku elit politik dengan ajaran agamanya.² Rendahnya moral dan integritas para birokrat dan aparatur negara ditengarai sebagai akibat dari beberapa faktor, misalnya, gagalnya sistem pendidikan dalam membangun karakter mereka ketika menempuh proses pendidikan, memudarnya

fungsi rumah tangga dalam menanamkan nilai-nilai agama dan budaya luhur, serta melemahnya kepedulian dan kontrol masyarakat. Melemahnya fungsi dan peran tiga elemen ini (rumah tangga, masyarakat, dan lembaga pendidikan formal) kait-mengait dan terakumulasi menjadi masalah nasional.

Akibatnya, bukan hanya berdampak bagi pribadi, tetapi lebih jauh telah mengakibatkan Indonesia mengalami krisis multidimensional yang berkepanjangan. Sekali lagi bahwa potret buram perilaku para pejabat dan birokrat dengan melakukan tindakan-tindakan penyelewengan tanggung jawab, berdasarkan beberapa faktor di atas, semuanya terangkum pada prihal tidak terinternalisasinya nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama dan keluhuran budaya di Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka konsistensi dan intensitas implementasi nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh agama, khususnya agama Islam, dan semua kearifan lokal termasuk yang telah ada pada etnis Bugis perlu digalakkan dan diperkuat membentuk karakter dan perilaku seluruh rakyat Indonesia, khususnya para penyelenggara negara dalam konteks pemerintahan guna meraih suatu pemerintahan yang *good governance*.

Akhirnya, tulisan ini berupaya menyuguhkan kajian yang difokuskan pada nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam al-Qur'an dan dalam kearifan lokal budaya suku Bugis guna memberikan informasi dalam kaitannya dengan penguatan landasan integritas para pemangku jabatan dalam penyelenggaraan negara.

²"Ketika Rakyat Tak Lagi Percaya Perilaku Elit Politik," *Berdikari Online*, 8 Juli, 2013, diakses pada 10 Desember 2017,

<https://www.berdikarionline.com/ketika-rakyat-tak-lagi-percaya-perilaku-elit-politik/>.

Penanaman Nilai-nilai Luhur

Sebelum diuraikan mengenai pendidikan nilai, mesti dipahami terlebih dahulu hakikat manusia sebagai objeknya. Manusia adalah entitas makhluk Tuhan yang unik. *Man The Unknown*, demikian kesimpulan Alexis Carrel³ yang sekaligus menjadi judul bukunya. Ia berkesimpulan seperti itu setelah sepanjang tahun melakukan penelitian untuk mengetahui hakikat manusia. Menurutnya, manusia adalah makhluk yang kompleks sehingga tidaklah mudah mendapatkan gambaran yang utuh tentangnya. Pengetahuan manusia tentang manusia tidak seperti pengetahuan manusia di bidang ilmu pengetahuan yang amat maju. Kesimpulan bahwa manusia adalah entitas yang tidak terketahui (*al-insān dzālika huwa al-majhūl*) adalah kesimpulan yang memang sudah diduga, karena penelitian Carrel berangkat dari ilmu fisika yang relatif, seperti pada penelitiannya tentang materi dan gejala-gejala materi, demikian kesimpulan Sayyid Quthub⁴. Hanya al-Qur'an yang mampu memberikan jawaban tuntas mengenai konsep manusia secara utuh dengan berbagai terma. Manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi luar (fisik) dan dimensi dalam (batin).

Berangkat dari kerangka itulah, cakupan pendidikan yang mencakup kedua dimensi itu secara simultan, dan penanaman nilai dimulai dari sisi dalam, sebagai dimensi dalamnya hanyalah digerakkan oleh nilai-nilai yang telah tertanam dari sisi dalamnya.

Pendidikan dalam perspektif al-Qur'an adalah pendidikan yang menfokuskan diri pada pembinaan manusia secara utuh, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan-Nya. Jika hal ini bisa mengejawantah, maka manusia akan mampu mengimplementasikan ajaran Islam secara komprehensif.⁵ Jika tidak, nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran Islam dan budaya mengalami disfungsi dan tidak berdaya berhadapan dengan tantangan modernitas dan aneka dampak yang ditimbulkannya. Modernitas tidak mungkin dapat dihalau perkembangannya.

Persoalan dan tantangan modernitas tidak lahir dengan sendirinya. Modernitas merupakan anak kandung yang lahir dari rahim kreativitas akal budi manusia yang berkembang sesuai dengan tantangan kehidupan manusia.⁶ Seiring perkembangan zaman terdapat tantangan dan permasalahan yang muncul dengan aneka bentuk. Nilai-nilai kejujuran tidak tertanam dalam kesadaran mereka. Hal tersebut terbukti pada ketidakmampuan manusia mengimplementasikan nilai kejujuran itu dalam menerima amanah publik.

Kejujuran (*lempu*? Bugis) tergerus oleh pola pikir materialisme dan hedonisme, maka jalan haram melalui tindakan-tindakan koruptif pun seolah tak terhindarkan dan memunculkan sejumlah problem dan krisis nilai dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Nilai-nilai luhur ajaran agama dan nilai-nilai kebijaksanaan suatu budaya hampir tidak

³Alexis Carrel (1873-1944), lahir di Lyon Perancis dan memperoleh gelar sarjana kedokteran di sana. Setelah beberapa tahun mengabdikan diri mengajar di Lyon ia berangkat ke Amerika Serikat dan bekerja pada Institut Sains dan Research Rockefeller di New York. Setelah bekerja selama hampir 30 tahun di New York, ia kembali ke Perancis dan bekerja di Kementerian Kesehatan. Pada tahun 1912 ia memperoleh hadiah Nobel untuk bidang sains. Lihat Sayyid Quthub, *Al-Islām wa Musykilāt al-Hadhārah* (Kairo: Dār al-Syuruq, 1993), 9.

⁴Lihat Quthub, *Al-Islām wa Musykilāt*, 9-25. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 68.

⁵Muhammad Sayyid Sultan, *Buhūth fi al-Tarbiyah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Ma'ārif, 1979), 53.

⁶Bandingkan dengan Amin Abdullah, "Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas", *Jurnal Pendidikan Lentera*, (1998), 3.

berdaya dan mengalami disfungsi menghadapi godaan materi. Keduanya kadang-kadang tidak mampu memproteksi setiap individu termasuk para aparatur Negara dalam konteks penyelenggaraan negara dari berbagai tindak pelanggaran konstitusi seperti tindak pidana korupsi, kesewenang-wenangan kekuasaan, politik kotor, dan lain sebagainya. Keadaan itu, pada konteks pemerintahan pasca orde baru, tidak mampu mendorong agenda reformasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an, kondisi tersebut meniscayakan adanya kesadaran untuk suatu reformasi atau perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Perubahan tersebut haruslah dimulai dari setiap individu masyarakat, khususnya para penyelenggara negara, sebagai bentuk kebulatan tekad sehingga Allah memberikan anugerah pertolonganNya kepada mereka sepantasnya diberikan. Hal ini diisyaratkan dalam firman-Nya pada QS. al-Ra'd [13]: 11, di bawah ini:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

“... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

Ayat ini mengandung informasi yang amat mendasar. **Pertama**, perubahan bermula dari manusia terlebih dahulu melalui “sisi dalamnya” sebagai makna yang diisyaratkan kata ‘*anfusihi*’. **Kedua**, perubahan yang bermakna dan efektif harus melalui sekelompok orang, bukan perorangan, sebagaimana diisyaratkan oleh bentuk jamak/plural *anfusihi*⁷ yang digunakan pada ayat di atas. Menurut Muhammad ‘Ali al-Shabūnī⁸ ayat ini menjelaskan hukum-hukum sosial (sunnatullah yang berlaku bagi masyarakat), itulah makna

anfusihi dalam bentuk *plural* (jamak). Ayat ini menuntun manusia sebagai masyarakat secara kolektif untuk bergerak menuju perubahan keadaan yang lebih baik.

Terma *anfusihi* (diri mereka sendiri) pada ayat tersebut juga menunjukkan ‘sisi dalam’ manusia yang meliputi idea-idea/nilai-nilai yang terdapat dalam benaknya, serta diyakini kebenaran dan manfaatnya yang melahirkan tekad yang kuat untuk merealisirnya. Dalam merealisir perubahan, al-Qur'an menempuh prinsip dasar yang dikemukakan oleh QS. al-Ra'd [13]: 11 di atas.

Petunjuk al-Qur'an, untuk memulai perubahan dengan pendidikan nilai serta pembinaan karakter (*character building*) atau revolusi mental yang pada gilirannya memperbaiki karakter, mental, dan perilaku yang diharapkan. Konsep pembinaan karakter ini merupakan *core values* (nilai-nilai inti) yang mesti ada adalah reformasi pendidikan untuk revolusi mental. Akan tetapi, hal inilah yang kadang-kadang terabaikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, sehingga terjadi pemisahan kecerdasan. Akibatnya, hanya melahirkan generasi yang tidak jujur dan koruptif. Termasuk pendidikan agama hanya sekedar penguasaan materi, tetapi sringkali melupakan penghayatan dan pengamalan nilai-nilainya. Ide internalisasi merujuk kepada ayat diatas, sebab ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa perubahan yang positif dan efektif harus dimulai dari sisi dalam pada manusia.

Didasarkan pada QS. al-Ra'd [13]: 11 di atas, perubahan harus dilakukan secara simultan, yaitu karakter aparatur dan perbaikan sistem birokrasi. Pembinaan karakter melalui pendidikan harus menyentuh aspek kesadaran nurani individu. Perbaikan karakter individu dengan memasukkan nilai-nilai luhur yang

⁷M. Quraish Shihab, “Pendidikan Nilai untuk Pembentukan Sikap dan Perilaku”, *Jurnal Pendidikan Lentera*, (1997).

⁸Syaikh Muhammad ‘Ali al-Shābūnī, *Shafwat al-Tafāsīr*, jil. 2 (Kairo: Dar al-Shābūnī, t.t.), 75.

bersumber dari agama dan budaya harus menyentuh sisi dalam manusia. Sisi dalam yang dimaksud meliputi paradigma, persepsi, kesadaran, dan ide.

Jadi, pembinaan karakter (*character building*) harus mampu menyentuh sisi dalam (*anfus*) pada manusia. Perubahan sistem dan undang-undang atau peraturan dan kebijakan tidak cukup, karena manusialah yang menentukan, *the man behind the gun*. Berangkat dari pandangan ini, maka pendekatan kemanusiaan (*humanity approach*) dalam reformasi adalah mutlak bersamaan dengan pendekatan sistem (*systemic approach*). Kedua pendekatan ini harus berjalan secara simultan, sebab manusia dalam kapasitasnya sebagai aparatur yang baik apabila tidak didukung oleh sebuah sistem dan birokrasi yang baik, akibatnya tidak berjalan secara efektif, dan sistem yang baik yang tidak didukung oleh manusia sebagai aparatur yang baik juga tidak bisa berjalan secara efektif. Sebaliknya, aparatur yang baik didukung sebuah sistem birokrasi yang baik, akan berjalan beriringan dengan baik.

Manusia yang memiliki karakter yang baik yang didukung oleh sistem yang baik, dan sistem yang baik dan sehat yang didukung oleh individu yang baik akan melahirkan budaya kerja yang baik dan sehat. Itulah antara lain makna yang ditunjukkan oleh QS. al-Ra'd [13]: 11 di atas dengan terma *anfusihim*. Perbaikan hanya bisa terwujud secara efektif dengan perpaduan antara kualitas personal dan profesionalitas aparatur didukung oleh sebuah sistem yang baik akan melahirkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah Swt dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. al-Tahrim: [66]: 6).

Perubahan positif akan menjadi efektif apabila didukung dengan keteladanan sebagaimana isyarat kalimat *فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ*, *pelihara dirimu dan keluargamu*. Konsep pembinaan karakter ini merupakan nilai-nilai inti (*core values*) yang mesti ada adalah reformasi pendidikan, birokrasi, dan tatanan sosial. Perubahan sistem dan Undang-Undang atau peraturan dan kebijakan saja itu tidak cukup, karena manusialah yang menentukan (*the man behind the gun*).

Pemberdayaan nilai-nilai agama dengan menanamkan nilai-nilai agama yang dianut sebagai instrumen kontrol terhadap perilaku manusia sebagai pengemban amanah. Hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai agama merupakan kebutuhan dalam mengatasi berbagai tindak kejahatan seperti manipulasi, fiktif, *mark-up*, *kickback*, dan korupsi.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan bangsa paradigma pendidikan dan pemberdayaannya harus menjadi tujuan pendidikan. Pendidikan tidak lagi berorientasi kognitif-intelektual semata, tetapi yang lebih urgen adalah internalisasi nilai-nilai luhur dalam kesadaran individu. Kecerdasan emosional dan spiritual harus mendapat penekanan dan porsi yang maksimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan, agar terbentuk individu-individu yang memiliki kecerdasan majemuk (*multiple intelegences*) untuk mencapai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kecerdasan yang utuh adalah keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Ketika perilaku aparatur tidak bisa lagi dikendalikan melalui pengawasan kontrol diri (*self control*) atau pengawasan diri dalam rangka membangun pemerintahan dan budaya kerja

yang baik dan bersih.⁹ Konsep percaya pada akhirat mengajarkan bahwa “*cukup dirimu sendiri yang menghisab dirimu sendiri*” sebagaimana petunjuk QS. al-Isrā [17]: 14. Pendidikan jiwa yang menjunjung tinggi kejujuran, kepatutan, kerja keras, serta budaya bersih dapat menjadi efektif jika ia bersumber dari ajaran agama—dalam hal ini Islam—sebab akan menghadirkan kesadaran mendalam bahwa setiap orang berada dalam monitoring Allah Swt. Seseorang yang menyadari dalam dirinya bahwa tidak ada niat, perilaku, dan ucapannya kecuali dalam pantauan Allah, tentu senantiasa mengontrol dirinya sendiri baik di kala sendirian maupun ketika bersama dengan orang lain. Manusia tidak curang saat sendirian dan tidak merasa kuat di saat bersama dengan orang lain, sebab mereka percaya bahwa Allah mengetahui dan menguasainya, sehingga tetap jujur di kala tidak dipantau oleh manusia dan tidak berjamaah dalam kejahatan di kala bersama dengan orang lain.

Pengawasan dan Pendekatan Agama (PPA) juga merupakan upaya mewujudkan kesadaran aparatur negara tentang arti penting pengawasan diri dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih, bermoral, dan profesional yang dibingkai dengan nilai-nilai spiritual-keagamaan. Pendekatan religius yaitu sebuah pendekatan untuk membangun mental aparatur dan masyarakat secara umum yang amanah. Dalam rangka mempersiapkan aparatur negara yang amanah, jujur, profesional, dan

bertanggungjawab di masa mendatang maka pendidikan agama yang terdiri dari perencanaan, proses, dan evaluasinya tidak lagi hanya pada aspek kognitif-teoretis yang menjadi fokus perhatian, tetapi yang urgen adalah terbangunnya kesadaran individu peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai agamanya.¹⁰

Pendekatan tersebut harus pula didukung oleh nilai-nilai budaya yang luhur dan sejalan dengan ajaran agama, agar keluhuran tersebut membudaya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Hal ini didasarkan pada manusia disamping makhluk yang memiliki dimensi spiritual, ia juga makhluk sosial yang berbudaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengenalan dan penggalian terhadap nilai-nilai budaya yang utama untuk menopang pembinaan karakter yang utuh dan kuat dalam kepribadian peserta didik menghadapi era dan tantangannya masing-masing kelak ketika mengambil peran-peran baik pada tataran birokrasi pemerintahan maupun dalam tatanan sosial.

Suku Bugis dan Nilai-Nilai Luhur Budayanya

Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda sekaligus kesamaan-kesamaan. Mereka meyakini dan berpegang pada nilai-nilai lokal yang khas. Nilai-nilai lokal itu disebut *al-'urf* (kearifan lokal). Salah satu etnik atau suku yang memiliki keteguhan dalam memegang nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal adalah suku Bugis,¹¹ sebuah suku yang ada di Sulawesi yang

⁹Tim Penyusun, *Mengembangkan Budaya Kerja Melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama* (Jakarta: Itjen Kementerian Agama RI, 2011), 3-4.

¹⁰Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2001), 172.

¹¹Secara historis, Bugis merupakan salah satu suku yang termasuk dalam suku-suku Melayu Deutero. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Secara literal kata “*bugis*” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan “*ugi*” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat

ini, yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai *To Ugi* atau orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Sawerigading Opunna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra *I La Galigo* dalam tradisi

terletak di bagian timur teritorial negara Indonesia. Suku ini dalam perkembangannya tidak hanya mendiami wilayah tertentu di Indonesia, bahkan menyebar ke seluruh nusantara dan beberapa negara.

Suku Bugis merupakan merupakan satu dari sekian banyak suku di Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya sebagai landasan dan pedoman dalam menjalani kehidupan bagi segenap individu yang ada di dalamnya. Pada umumnya, termasuk dalam etnis Bugis, kepatuhan terhadap nilai-nilai luhur tersebut diyakini sebagai sikap yang akan membawa kemaslahatan baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya dan, sebaliknya, pembangkangan terhadapnya adalah sumber malapetakan baginya dan orang lain.

Berdasarkan fakta tersebut, nilai-nilai luhur dan keunikan yang terdapat dalam kebudayaan Bugis perlu dan relevan untuk digali kembali guna merespon munculnya berbagai tantangan global termasuk pengaruh budaya yang menyertai perkembangan dan kemajuan tersebut dan berdampak pada kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa.

Indonesia, dilihat dari aspek kebudayaan merupakan Negara yang unik, khas, dan kaya akan nilai. Untuk mengakui eksistensinya maka dirumuskanlah semboyan berbangsa, yaitu “berbeda-beda tetapi tetap satu jua” atau Bhineka Tunggal Ika.

Karena Bhineka Tunggal Ika disepakati oleh pendiri bangsa sebagai semangat berbangsa maka pada saat yang sama negara secara mutlak menjadikan semangat tersebut sebagai sumber nilai. Bhineka Tuggal Ika mengindikasikan keragaman dan salah satunya adalah keragaman nilai budaya atau kearifan lokal. Kesadaran ini melandasi masyarakat dan juga pemerintah untuk terus berupaya menggali nilai-nilai dan

khazanah lokal yang sarat dengan nilai-nilai luhur dalam rangka menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

Nilai-nilai luhur tersebut merupakan cerminan budaya dan karakter masyarakat Indonesia pada umumnya. Kearifan lokal lebih dikenal dengan istilah *al-‘urf* dalam kajian hukum Islam. *Al-‘urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam, yakni menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam sejarah, budaya masyarakat Sulawesi Selatan sudah tercatat di dalam literatur kuno orang Bugis-Makassar dengan istilah “Lontara”. Di dalam *Lontara*, terdapat ajaran-ajaran yang menceritakan tentang asal-muasal kejadian manusia, terjadinya kerajaan, dan aturan-aturan kehidupan manusia. Meskipun penjelasan secara rinci tentang keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam masih terbilang kurang.

Menurut Mattulada bahwa pada zaman pra Islam, budaya Sulawesi Selatan belum dapat diungkapkan melalui sumber-sumber tertulis, barulah dapat diungkapkan sekitar abad XIV M hingga diterimanya Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Bugis pada awal abad XVII M. Dalam kurun waktu tersebut, sumber yang melukiskan keadaan masyarakat tersebut hanyalah *Lontara*.¹² Hal itu disebabkan tradisi tulis belum tumbuh dan berkembang, sehingga *pappaseng* (petuah-petuah bijak secara lisan) yang diwarisi secara turun temuruan lebih dikenal.

Masyarakat Bugis merupakan salah satu suku bangsa yang kuat berpegang pada adat-istiadat atau *ade’* dalam tutur budaya Bugis. Menurut pemahaman masyarakat Bugis bahwa konsep *ade’* atau berpegang teguh pada adat-

masyarakat Bugis. Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Lihat, Bitar, “Sejarah Suku Bugis, Rumah Adat, Bahasa,

Kebudayaan & Kesenian,” diakses pada 10 Desember 2017, <https://www.gurupendidikan.co.id/suku-bugis/>.

¹²Mattulada, “Sulawesi Selatan Pra Islam,” *Buletin Yaperna* 12, no. 3, (1976).

istiadat merupakan esensi manusia, *ade'* itulah yang menyebabkan seseorang disebut manusia. Seorang yang tidak mengetahui, tidak menghayati, dan tidak memerankan diri dengan *ade'* maka tidak dapat disebut manusia. Dari *ade'* itulah manusia berpangkal.

Tanpa *ade'* yang menjadi pangkal kemanusiaan, maka apa yang disebut *lempu'* (kejujuran), takwa kepada Allah dan mempertinggi *siri'* sebagai nilai dan martabat kemanusiaan, tidak mungkin terwujud. *Ade'* (adat) bagi orang Bugis itu adalah nilai dan harga dirinya. Aturan-aturan itu disebut *pangngaderreng*. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang menata kehidupan manusia.

Nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan orang Bugis itu perlu diungkapkan dalam setiap gerak kehidupan orang Bugis dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan yang penuh tantangan. Nilai-nilai itu diciptakan karena dimuliakan oleh para leluhur mereka sebagai peletak dasar masyarakat dan kebudayaan Bugis. Selanjutnya, dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam upaya mewariskannya, ia menyampaikan dalam bentuk nasihat atau pesan. Nasihat dan petuah itu terdapat dalam *lontara'*-*lontara'* yang disebut *pappanggaja* dan *paseng*.¹³ Saat ini, kebudayaan Bugis dapat ditelusuri dalam beberapa sumber dan literatur, misalnya dalam "Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis".¹⁴ Kebudayaan orang Bugis mempunyai nilai-nilai luhur berupa kejujuran, kecendikiaan, kepatutan, keteguhan, usaha atau kerja keras. Nilai-nilai ini berhadapan dengan tantangan global dan mulai terusik, sehingga perlu diperkenalkan dan diajarkan kepada generasi muda.

Identifikasi Nilai-nilai Kebudayaan Bugis yang Sejalan dengan al-Qur'an

Nilai-nilai kearifan lokal yang dikenal dalam kajian Islam sebagai al'urf merupakan nilai-nilai yang dijadikan salah pertimbangan pengambilan kesimpulan hukum. Nilai-nilai tersebut diakomodir dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Nilai-nilai kearifan budaya masyarakat Bugis tersebut diantaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Lempu' (Kejujuran)

Dalam perkataan orang Bugis, jujur disebut *lempu'*. *Lempu'* berarti "lurus" yang merupakan antonim dari kata 'bengkok'. Penggunaan kata tersebut dalam berbagai konteksnya, berarti juga ikhlas, benar, baik atau adil. Misalnya, *laleng malempu'* artinya jalan yang lurus. Dengan demikian antonim kata-kata tersebut yaitu curang, culas, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya, dan sebagainya. Dalam istilah al-Qur'an, kejujuran disebut *al-shidq*.

Orang jujur disebut *al-shādiq*, dan orang jika kejujuran ini melembaga dalam karakter dan kepribadiannya maka ia disebut *al-shiddiq*. Rasulullah memiliki karakter *shiddiq*, sahabatnya, Abu Bakar, juga dijuluki *al-shiddiq*. Mereka jujur dalam menerima dan menyampaikan sesuatu.

Masyarakat Bugis juga mempunyai nilai budaya *Siri'* yang dalam istilah al-Qur'an dan hadits disebut *al-haya'* (malu). Disamping itu, ada pula *pesse* (solidaritas). Prinsip ini, bagi masyarakat Bugis, adalah suatu norma yang sangat dihormati, karena hal itu merupakan bukti bahwa seseorang dapat menjaga

¹³A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2011).

¹⁴Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 37-66.

kesucian diri dan kehormatannya. Dalam kaitan ini, syair orang Bugis menyebutkan: “*Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue*” Artinya: “*Dua (hal) yang kujadikan pagar (pelindung diri dan kehormatan), yaitu bunga nangka dan hiasan kuku*”.¹⁵

Kata ‘*panasa*’ pada ‘*unganna panasae*’ yang sinonim dengan kata “*lempu*”.¹⁶ Bila diberi tekanan *glottal stop* (‘) pada suku kata terakhir menjadi *lempu’*, maka kata itu berubah maknanya menjadi ‘kejujuran’. Adapun frase “*belona kanukue*”, digunakan untuk hiasan kuku (*belo kanuku*) yang disebut *pacci*. Kata *pacci*, bila mendapat tambahan bunyi “ng” pada akhir kata *pacci* menjadi *paccing*, maka kata itu berubah arti menjadi steril, tidak ternoda, bersih, dan suci.

Kalimat, “*Duwai kuala sappo; unganna panasae, belona kanukue*” dapat diartikan “*dua yang senantiasa dijadikan pagar yaitu kesucian dan kejujuran*”.¹⁷ Kesucian yang dimaksud dalam hal ini adalah suci dalam hati, pikiran, dan tindakan. Suci dalam hati (ikhlas) itu

mengandung arti adanya ketulusan hati, kebeningan jiwa, *mindset* positif, tidak iri, dan sebagainya. Sedangkan suci dalam tindakan adalah menjaga hal-hal yang memalukan dan menurunkan martabat, baik dalam perspektif budaya maupun perspektif agama.

Berangkat dari penjelasan di atas, dalam konteks penyelenggaraan kemasyarakatan dan ketatanegaraan, *lempu’* dan *paccing* mengajarkan untuk selalu amanah dalam mengemban tanggung jawab yang didampukkan oleh rakyat dengan berlandaskan pada nilai kejujuran untuk selalu menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak melakukan korupsi, sebab korupsi adalah kejahatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran. Kejujuran (*lempu’*) merupakan nilai utama budaya masyarakat Bugis, sehingga selama nilai ini terjaga dengan baik, maka hati dan tindakannya seluruhnya menjadi lurus dan tidak korup.

Ketika Tociung, Cendikiawan Luwu, diminta nasihatnya oleh calon raja (*datu*) Soppeng, La Manussa’

¹⁵Dalam tradisi Bugis ada dua norma yang sangat dihormati selain dari norma-norma agama, yaitu *siri’ dan passe’*. *Siri’* adalah “harga diri”, yaitu suatu unsur yang sangat prinsipil dalam diri bagi orang Bugis. Bagi orang Bugis, *siri’* adalah jiwa mereka, harga diri mereka, dan martabat mereka. Oleh karena itu, untuk menegakkan dan membela ‘*siri’* yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka orang Bugis bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *siri’* dalam kehidupan mereka. Hamid Abdullah, *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar* (Jakarta: Inti Dayu, 1985). Sementara *passe* adalah rasa solidaritas sesama orang Bugis, yaitu suatu nilai dimana ikut merasakan penderitaan orang lain dengan perasaan haru (empati) yang mendalam terhadap sesama. Christian Pelras, *Manusia Bugis, The Bugis*, terj. Abdul Rahman Abud, dkk. (Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005). Bandingkan dengan Mursalim, “Tafsir

Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur’an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan: Kajian terhadap Pemikiran-Pemikirannya” (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 231-232.

¹⁶Mattulada, “Latoa: Suatu Lukisan terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis” (Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1975), 13. Lihat pula Mursalim, *Tafsir Bahasa Bugis*, 232.

¹⁷Salah satu keunikan bahasa Lontarak adalah dalam satu kata bisa saja memiliki arti yang sangat jauh berbeda dengan arti lainnya demikian juga bacaanya, karena di dalam penulisannya tidak memiliki tanda-tanda khusus, misalnya *tasydid* (huruf doble) dan *maddah* (panjang). Contoh kata bk (*ba+ka*) dapat dibaca dengan berbagai bunyi, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Kata tersebut dapat dibaca bk (*baka*) yang berarti *keranjang*; tetapi ia juga dapat dibaca bk (*baka*) yang berarti *buah sukun*, dan dapat pula dibaca bk (*bakka’*) yang berarti *buah yang belum ranum (masih setengah matang)*.

Toakkareng, Tociung menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu: 1). memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, 2). dipercaya lalu tidak curang, artinya disandari lalu tidak berdusta, 3) tidak menyerakahi yang bukan haknya, dan 4) tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama. Dalam bahasa Bugis dikatakan:

“Eppa’ gau’na lempu’e: risalaie naddampeng, riparennu Angie temmacekko bettuanna risanresi teppabbelleang, temmangoangenngi tenia alona, tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng”.¹⁸

Sejalan dengan pengertian di atas, Kajaolaliddong, cendikiawan Bone, menjelaskan kejujuran ketika ditanya oleh Raja Bone mengenai pokok-pokok keilmuan. Apa saksinya atau bukti kejujuran? *“Seruan ya Ampone!”* Apa yang diserukan *ya Kajao?* Adapun yang diserukan ialah:

“Aja’ muala taneng-taneng tania taneng-tanengmu. aja’ muala warang-parang tania warang-parangmu nataniato mana’mu, aja’to mupassu tedong natania tedongmu, enrengge annyarang tania anynyarangmu, aja’to muala aju ripasanre’ natengnia iko pasanre’i, aja’to muala aju riwetta wali

*netengnia iko mpetta waliwi.”*¹⁹

Pesan-pesan (*paseng*) di atas menunjukkan komitmen kejujuran orang Bugis yang berpegang pada budayanya, yakni tidak mengambil hak orang lain. Pemerintah tidak mengambil hak rakyat melalui korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Di dalam petuah Bugis di atas dikatakan, kayu yang sudah dipotong pertanda ada yang punya. Kalau yang tersimpan di pinggir jalan saja dipesankan agar tidak diambil, apalagi yang jelas dijaga di dalam pagar, berarti jelas tidak boleh diambil karena milik orang lain. Pesan ini diungkapkan dalam bahasa Bugis dengan sangat halus dan mengandung kedalaman makna, yakni komitmen kejujuran. Bagi orang Bugis, kandungan filosofis pesan tersebut merupakan nilai dan harga dirinya.

Lempu’ adalah harga dirinya, sehingga jika ia kehilangan *lempu’* atau kejujuran berarti kehilangan kepercayaan dan pada saat yang sama harga dirinya ikut lenyap. Sebaliknya, jika kejujuran terpelihara dengan baik, maka nilai dan harga diri serta martabat insanियahnya ikut terpelihara dengan baik. Dalam pandangan nilai-nilai utama kebudayaan Bugis, kesesuaian antara kata dan perbuatan disebut *“taro ada taro gau”* (antara kata dan perbuatan sama).

¹⁸Artinya: “Ada empat inti perbuatan jujur: Memaafkan kesalahan orang lain padanya, jujur dalam menerima amanah, artinya tidak berkhianat, tidak serakah dan tidak mengambil yang bukan haknya, ia tidak menganggap kebaikan kecuali baik juga bagi orang lain.” Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 119-120. Rahim mengutip dari Lontarak milik H. Andi Mappasala. Kalimat *“...tennaseng deceng rekko nassamarini pudeceng”* ini agaknya rancu. Sesuai dengan artinya “tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya, baginya baru dikatakan kebaikan kalau bisa dinikmati bersama” mestinya bunyinya kurang lebih demikian

“...tennaseng deceng rekko- deceng rialemi, iyapa nariasenng deceng rekko- nassamarini pudeceng.”

¹⁹Artinya: “Jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu, jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu, bukan juga pusakamu; jangan mengeluarkan kerbau (dari kandangnya) yang bukan kerbaumu, juga kuda yang bukan kudamu, jangan ambil kayu yang disandarkan, bukan engkau yang menyandarkan, jangan juga kayu yang sudah ditetak ujung pangkalnya, yang bukan engkau yang menetaknya.” Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 235.

Kata “*ada*” pada ungkapan di atas memiliki makna “pegangan”. Kata atau ucapan ketika keluar dari mulut maka bukan lagi milik yang mengucapkan, sehingga ia akan menjadi alat ukur orang lain tentang orang yang mengucapkan. Pembuktiannya dalam bentuk perilaku atau perbuatan nyata. Jadi, mengeluarkan kata harus penuh pertimbangan agar tidak asal keluar tanpa makna kebaikan.

Sejalan dengan nilai budaya kejujuran dalam budaya Bugis, al-Qur’an pada QS. al -Ra’d [13]: 11 dan QS. al Tahrim [66]: 6 tersebut di atas mengajarkan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik dan memelihara diri dapat ditunaikan dengan memupuk kejujuran yang dibangun dari kesadaran dalam jiwa bahwa Allah mengawasi dirinya. Allah menganugerahi kejujuran orang yang bersih hatinya. Kesucian hati ini dikenal pula dalam budaya Bugis dengan istilah “*pacci*” yang sering dinarasikan ketika acara “*mappacci*” menyambut acara akad nikah.

Pemerintahan dan pribadi yang bersih mesti dimulai dari kebersihan batin. Kejujuran tidak diragukan lagi sebagai bagian dari ajaran yang sangat prinsipil berdasarkan petunjuk al-Qur’an yang antara lain diistilahkan dengan ‘*al-shiq*’ dan istilah-istilah derivatifnya (*tashrif*). Sifat jujur (*shiddiq*) ini menghiasi perilaku Nabi, dan Abu Bakar al-Shiddiq serta sahabat-sahabat yang lainnya.

Nilai budaya *lemphu*’ dalam budaya Bugis adalah ajaran yang sejalan dengan sifat Nabi dan para sahabatnya. Bedanya

yaitu, kejujuran Nabi dan para sahabat standarnya adalah wahyu sedangkan budaya *lemphu*’ bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. al-Qur’an seringkali mengakomodir dan mengapresiasi budaya-budaya yang sejalan dengan fitrah kesucian termasuk fitrah kejujuran.

Masyarakat muslim yang memangku suatu jabatan pemerintahan memiliki posisi penting dalam memelihara kejujuran guna menciptakan pemerintahan yang bersih tanpa tindakan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran konstitusi lainnya, sebab sejalan dengan al-Qur’an yang mengajarkan kejujuran. Kearifan lokal dapat menjadi keharusan universal selaras dengan nilai-nilai luhur dalam al-Qur’an sebagai petunjuk yang berlaku universal (*hudan li al-nās*).

2. *Amaccang* (Nilai Kecendikiaan)

Kejujuran dan kecendikiaan adalah prinsip bagi orang Bugis yang saling berhubungan. Ciri utama kecendikiaan adalah tidak ada yang sulit dilaksanakan, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut, dengan kata-kata yang baik dan lemah-lembut lagi percaya kepada sesama manusia. Jujur dalam budaya Bugis ialah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan lagi takut kepada Tuhan.²⁰

Kecendikiaan seseorang tidak diukur seberapa banyak teori yang ia kuasai atau seberapa banyak strata pendidikan yang ia selesaikan, melainkan terukur dari konsistensi antara kata dan perbuatan baiknya.

²⁰A Hasan Machmud, *Silasa: Kumpulan Petuah Bugis-Makassar* (Jakarta: Saudagar, 2000), 36. Bandingkan dengan Waspada Santing, dkk., *Refleksi 75 Tahun Prof. Dr.*

Hj. Andi Rasdiyana; *Meneguhkan Eksistensi Alauddin* (Makassar; Pustaka al-Zikra, 2010), 196-199.

Dalam bahasa Bugis ‘cendikia’ sering diartikan ‘acca’, yaitu pandai atau pintar. *Acca* ini lebih kepada makna yang positif, dan tidak sebaliknya. *To acca* adalah orang mempunyai kearifan. *Acca* adalah perilaku baik cara berpikir maupun cara bertindak dapat menjadi pertimbangan yang arif.²¹

Jadi, *acca* bukan latar belakang pendidikan formal semata, melainkan juga nilai-nilai kearifan yang menghiasi cara berpikir dan bertindak. Tidak disebut pula *To Acca* kalau tidak jujur. Kalau ada orang berilmu tetapi tidak jujur, tidak pemaaf, serakah, mengambil yang bukan haknya maka hakikatnya ia tidak pandai (bukan *To Acca*). Sayangnya di Indonesia, kebanyakan pelaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang justru dari kalangan pejabat yang menyandang status sarjana. Itu berarti, lembaga pendidikan yang pernah ia tempati menimba ilmu gagal menjadikannya sebagai cendikiawan, karena tidak memiliki karakter yang baik.

Kearifan seseorang mencerminkan kedalaman penghayatannya terhadap nilai-nilai yang ia ketahui dan ia anut sebagai landasan setiap kata dan perilakunya. Nilai-nilai kearifan itu juga dikenal dalam al-Qur’an dengan istilah ‘*al-ma’ruf*’. Dalam perspektif sufi, orang yang menyelami nilai-nilai yang hingga mengenal Allah dalam setiap ruang dan waktu disebut ‘*al-‘arif billāh*’. Karena ia mengenal Allah dalam dirinya, ia tidak mengkhianati-Nya, dan senantiasa berlaku jujur.

Pengetahuan tertinggi adalah makrifat kepada Allah karena

pengetahuan diajarkan langsung oleh Allah bagi orang-orang yang dikehendaki. *To Acca* (cendikiawan, arif) mestilah orang yang mengenal Allah dalam dirinya. Meskipun tidak semua umat Islam harus menjadi sufi mengenal Allah, namun perilaku nilai-nilai sufistik dalam semua keadaan di zaman edan sekarang harus terejawantahkan. Adakalanya cendikiawan disebut dalam al-Qur’an dengan istilah ‘*al-‘ulama*’ dengan ciri utamanya adalah takut kepada Allah karena ia meraih ma’rifat. Allah berfirman:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para Ulama, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*” (QS. Fāthir [35]: 28).

Ketakwaan (*khasyyah*) yang berangkat dari pencapaian ma’rifat kepada Allah adalah buah dari ilmu yang berisi cahaya Ilahi di dalam kalbunya. Sedangkan orang yang rindu dan cinta kepada dunia sehingga ia mengutamakan daripada akhirat adalah makhluk yang paling bodoh, dungu, dan tidak berakal.²² Keserakahan kepada dunia mendorong manusia menjadi serakah terhadap asesoris duniawi meski melawan hukum. Sedangkan cendikiawan yang bertakwa kepada Allah, tujuannya hanyalah Allah.

3. *Asitinajang* (Nilai Kepatutan)

Kepatutan, kepantasan, kelayakan dalam bahasa Bugis disebut *asitinajang*. Kata ini berasal dari *tinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Dalam

²¹Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 126.

²²Ibnu Rajab al-Hanbali, *Tazkiyatun Nafs: Konsep Pensucian Jiwa Menurut Ulama Salafusshalih* (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 165-168.

al-Qur'an disebut dengan beberapa terma, diantaranya *al-mizan* atau *al-waznu*²³ (keseimbangan, kepatutan), *alqisthu*²⁴ (tidak berat sebelah), *al-'adlu* (sesuai tempatnya). Lontarak mengatakan: *onroiwi onrongmu, tudangi tudangenmu*" (Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu)."²⁵

Ade' Wari (adat perbedaan) dalam budaya Bugis pada prinsipnya mengatur segala sesuatu agar berada pada tempatnya, termasuk perbuatan *mappasitinaja*. Kewajiban yang dibaktikan dengan memperoleh hak yang sepadan adalah sesuatu perbuatan yang patut, banyak atau sedikit, tidak dipersoalkan dalam konsep *sitinaja*. Hal ini sesuai dengan petuah: "*Alai cedde'e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang*."²⁶ Artinya: "*Ambillah yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan tolaklah yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan*". Serakah dan mengambil yang bukan hak adalah tidak patut (*de'nastinaja*).

Prinsip *asitinajang* adalah *sitinajai resona na appoleangenna*, asas kepatutan adalah cocok atau sesuainya antara pekerjaannya dengan pendapatannya. *Mappasitinaja* merupakan wujud dari sikap tidak berlebihan (*ghulul*).²⁷ *Ghulul* adalah berkhianat terhadap amanah yang diemban. Dalam prinsip budaya orang Bugis yang menghayati dan

mengamalkan budayanya, memperoleh hasil harus sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tanggung jawabnya, dan lain-lain.

Tindak korupsi dalam penyelenggaraan negara merupakan jalan pintas yang sangat tidak pantas (haram. ilegal), melanggar aturan, norma, sebab hal itu merugikan rakyat dan negara. Pejabat negara ataupun swasta yang memperoleh hasil tidak sesuai dengan kerjanya itu tidak pantas (*de' nasitinaja*). Ukuran kepatutan itu bisa diukur dari aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam takaran agama mengenai halal dan haram. Bagaimana kriteria halal dan haram dalam Islam, dan kejujuran adalah iman dan takwa yang hakiki kepada Allah Swt. Dalam kehidupan bernegara, hal ini juga sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia sila pertama Pancasila "Ketuhanan yang Maha Esa" dengan butir-butirnya.

Kalimat pada petuah: "*Alai cedde'e risesena engkai mappideceng, sampeangngi maegai risesena engkai makkasolang*" mengandung pesan yang sangat mendalam. Mengambil atau menerima yang sedikit itu (*alai cedde'e*), di dalam kajian tasawuf disebut *qana'ah*. Sedangkan petuah: *engkai mappideceng* (yang mendatangkan kebaikan) dalam kajian *ushul fiqh* disebut *al-mashlahat*.

Sebaliknya, kalimat petuah: *sampeangngi maegae risesena engkau mekkasolang* (hindari/tolak sesuatu

²³QS. Al-Rahmān [55]: 7-9.

²⁴QS. Al-Hujurat [49]: 9.

²⁵Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 126. Makna tersebut sejalan dengan makna keadilan, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Antonim kata "adil" adalah zalim (aniaya). Dengan demikian, orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah orang yang berlaku aniaya. Perlakuan yang zalim bertentangan dengan kemaslahatan dan hikmah. Lihat, Sayyid

Mujtaba Musawi Lari, *Teologi Islam Syi'ah*, terj. Tholib Anis (Jakarta: al-Huda, 2014), 47.

²⁶Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 130. Korupsi, selain tidak pantas (*de' nasitinaja*), ia juga merusak (makkasolang), karena iitu korupsi bertentangan dengan nilai budaya Bugis dan sangat memalukan.

²⁷*Ghulul* adalah khianat terhadap amanah seperti disebutkan dalam QS. Ali 'Imran [3]: 161.

pendapatan yang banyak namun mendatangkan *mafsadat*). Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah “*dar’u al-mafāsīd*” yakni mencegah mafsadat/dampak buruk. Keseluruhan makna yang terkandung pada kalimat tersebut relevan dengan pesan moral al-Qur’an.

Petuah tersebut memberikan garis panduan nilai yang jelas mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh, yang baik dan tidak baik. Kepatutan itu setara dengan kebaikan, sedangkan ketidakpatutan itu setara dengan kerusakan. al-Qur’an mengajarkan prilaku kepatutan untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah ketidakpatutan untuk mencegah kekacauan dan dampak buruk lainnya.

Esensi kepatutan itu adalah senantiasa berlaku adil. Hal ini diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur’an, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kerabat dan mencegah dari kemungkaran.*” (QS. al-Nahl [16]: 90).

Perintah berlaku patut dan ihsan secara tegas disebutkan dalam bentuk yang tegas sebagai perintah Allah.

4. *Agettengeng* (Nilai Keteguhan)

Dalam bahasa Bugis keteguhan adalah *agettengeng*. Dalam istilah al-Qur’an, keteguhan disebut *istiqamah*. Prinsip keteguhan orang Bugis tetap pada asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat

memegang sesuatu. Prinsip keteguhan (*agettengeng*) ini terikat oleh nilai positif. Berikut rinciannya: “*Eppa gau’na gettengnge: tessalaie janci, tessorosie ulu ada, telluka anu pura teppinra assituruseng, mabbicara naparapi, mabbinru’i tepupi napaja*”.²⁸ (Empat nilai keteguhan; *pertama*, tidak mengingkari janji, *kedua*, tidak mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan, *ketiga*, tidak mengubah keputusan, dan *keempat*, berbicara dan berbuat, tidak berhenti sebelum rampung). Nilai-nilai ini sudah lama dikenal sebelum datangnya Islam dan dijadikan panduan nilai oleh orang Bugis sebelum dan setelah datangnya Islam.

Keteguhan adalah sebuah prinsip konsistensi dan keberanian menanggung resiko atas kejujuran, kebenaran, kepantasan, sehingga ia tidak akan mungkin goyah oleh godaan. Prinsip *getteng* tidak memberikan peluang terjadinya praktek suap atau gratifikasi, *money politics*, dan pengkhianatan lainnya dalam semua pekerjaan atau profesi. Keberanian (*awaraning*) kadang harus menanggung resiko nyawa sebagai taruhan, tetapi itulah harga diri (*siri*’).

Pribahasa “lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai” adalah sebuah pribahasa yang sesuai dengan prinsip *siri*’ dan *agettengeng* yang dikenal dalam budaya Bugis. Jika ia seorang pejabat misalnya, ia memegang prinsip ‘lebih baik kehilangan jabatan daripada mendudukinya dalam keadaan tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa’. Sekali ia menduduki jabatan dan kewenangan, ia harus memberikan nilai dan manfaat bagi

²⁸Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, 133.

masyarakat secara adil (*temmappasilaingeng*). Jadi, jabatan tidak menjadi tujuan, melainkan sebagai kesempatan dan amanah berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi negara dan rakyat.

Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban memelihara amanah dalam berbagai hal, antara lain pada firman-Nya:

فَأَسْتَقِيمْ كَمَا أُورِثَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

“Maka tetaplah (*istiqamahlah*) kamu - pada jalan yang benar -, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah bertaubat bersama kamu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kalian kerjakan”. (QS. Hūd [11]: 112).

Sikap istiqamah tersebut terlihat pada keteguhan memegang amanah dan janji yang diterima atau diikrarkan. Bagi orang Bugis yang memelihara budaya *agettengeng* berarti juga memelihara perintah Allah untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Jika *agettengeng* (istiqamah) tergerus oleh pengaruh materi maka hilanglah prinsip tersebut, korupsi dan kesewenang-wenangan segera mewarnai aktivitas politis seseorang dalam konteks pemerintahan.

5. Reso (Kerja)

Reso dapat bermakna kerja. *Makkareso* berarti bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam terminologi

al-Qur'an disebut '*amala* (bekerja), *jahada* (bersungguh-sungguh).²⁹

Nilai-nilai *reso* (kerja, usaha) sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kejujuran (*lempu*), kecendikiaan (*amaaccang*), kepatutan (*asitinajang*), dan keteguhan (*agettengeng*). Bahkan, usaha dan kerja keras (*reso*) adalah kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai *lempu*, *acca*, *asitinajang*, *getteng*, sebab nilai-nilai ini baru dapat berperan secara tepat guna dan berdaya guna apabila didukung oleh nilai-nilai usaha (*reso*). Dengan sendirinya, nilai usaha ini pun tegak di atas landasan nilai-nilai tersebut.³⁰

Kerja nyata merupakan yang dibingkai dengan nilai-nilai tersebut akan mengantarkan pada hasil kerja yang maksimal yang melahirkan *public trust*. Sementara, kepercayaan publik akan datang karena adanya kompetensi personal dan kompetensi intelektual yang dimiliki seseorang. Perpaduan kedua kompetensi tersebut menjadi tolok ukur seseorang dinilai mampu mengemban amanah.

Lontara' mencela orang yang pemalas, tidak ada usahanya, dan hanya menghabiskan waktunya dalam kesia-siaan. Dalam Islam pun demikian, Nabi mengajarkan doa memohon perlindungan dari sikap malas, memerintahkan untuk bekerja dan melarang manusia menjadi beban bagi orang lain, serta perintah memanfaatkan waktu untuk melakukan kebajikan.

Bagi orang Bugis yang merawat budaya *reso*, di manapun mereka berada, kegigihan dan kerja keras itu senantiasa

²⁹Istilah *amal* di dalam Al-Qur'an selalu didahului kata "iman". Artinya, bekerja yang sungguh-sungguh harus didasari oleh nilai iman agar menjadi bekerja bernilai ibadah. Sebab, mencuri, merampok, dan sejenisnya juga tidak selamanya mudah, bahkan

terkadang sulit sehingga membutuhkan kerja dan pikiran yang sungguh-sungguh, tetapi kesungguhan dalam mencuri dan merampok tidak didasari oleh iman, melainkan oleh nafsu dan syahwat duniawi semata.

³⁰Bandingkan dengan Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 136.

menghiasi dirinya. Nilai-nilai itulah yang menjadi kunci keberhasilan orang Bugis, di manapun bumi dipijak di situ langit dijunjung. Berpijak pada nilai-nilai ini, serta menjunjung tingginya akan melahirkan kepercayaan (*trust*), sehingga mereka dapat eksis di manapun berada. Sebaliknya, kemalasan dan ketidakjujuran hanyalah akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mereka di manapun berada.

Ada empat hal yang diperintahkan oleh *lontara'* bagi pengusaha, yaitu: *pertama* kejujuran, karena dengannya akan menimbulkan kepercayaan; *kedua*, pergaulan, karena akan dengan pergaulan yang baik akan mengembangkan usaha, *ketiga*, kecendikiaan, karena ia akan memperbaiki pengelolaan dan ketatalaksanaan, dan *keempat*, modal, karena inilah yang menggerakkan usaha.³¹

Dalam konteks ini, *reso* bersifat universal dan merupakan kunci kesuksesan hidup bukan hanya bagi orang Bugis dan bagi semua orang di dunia. Prinsip *reso* atau budaya kerja yang didasari nilai kebaikan dan iman tidak disangsikan lagi sebagai budaya yang relevan dengan ajaran Islam. *Reso* dalam budaya Bugis, tidak sekedar kerja keras, melainkan juga berpikir cerdas (*macca*) dan lurus (*lempu'*).

Islam memerintahkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu orang yang lemah secara benar. Dalam kacamata Islam dan budaya Bugis, orang yang bekerja dan tidak menggantungkan diri pada belas kasih orang lain lebih mulia daripada orang meminta-minta. Tangan di atas lebih bak daripada tangan di bawah. Itu

sebabnya, al-Qur'an hanya menggunakan kalimat perintah untuk memberi dan perintah membalas pemberian dengan terimakasih diiringi doa. Zakatnya misalnya, digunakan kalimat perintah "berikanlah atau antarkanlah zakat". Kewajiban berzakat menunjukkan adanya perintah untuk bekerja keras agar seseorang mampu memberi zakat. Budaya kerja mengajarkan manusia agar tidak mengambil hak orang lain melalui korupsi.

6. Prinsip *Siri'* (Malu)

Prinsip yang disebut *siri'* dikenal dalam Islam dengan istilah *al-haya'* (malu) dan *'iffah* (kehormatan dan harga diri). Prinsip ini merupakan salah satu prinsip utama masyarakat Bugis. *Siri'* pada mulanya berkonotasi positif, tetapi kemudian dapat pula berkonotasi negatif.³² Jika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, itu memalukan (*mappakasisiri'*). Jika ia melakukan hal-hal yang jelek dan memalukan di saat itulah harga diri dan nilainya turun. Sebaliknya, jika ia melakukan hal positif dan baik, di saat itulah ia menaikkan derajat kemanusiaannya sebagai orang Bugis.

Orang yang telanjang dari perasaan malu (*siri'*) oleh *lontara'* orang itu diserupakan dengan binatang. Binatang paling buruk adalah binatang yang kerjanya hanya melakukan kerusakan, menjengkelkan, menjijikkan, yakni tikus. Di sawah ia merusak tanaman (disebut hama padi), setelah dipanen dan disimpan di *rakkiang* rumah juga dirusak, selesai ditumbuk menjadi beras, sudah dimasak, tikus terus mempreteli. Nasi yang sudah dimakannya, dikotori

³¹Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 137.

³²Rahim, *Nilai-Nilai Utama*, 139-140.

dengan kotorannya pula, kemudian ia turun ke tanah dan disitu kotorannya pun dijilati, dan dinding dilobangi. Itu merupakan ilustrasi perilaku orang yang kehilangan *siri'* atau rasa malu. Gambar tikus seringkali dibuat dan dipasang di berbagai media untuk menyindir para koruptor, sebab terdapat kesamaan sifat diantara keduanya.

Pengaruh syahwat terhadap harta adalah syaitan dari dalam diri manusia yang membisikkan kejahatan ke dalamnya.³³ Ketika rasa malu hilang maka pertanda syaitan menguasai dirinya. Hal inilah yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa sehingga terjatuh seperti diketahui dalam firman-Nya:

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga....” (QS. al-A‘rāf [7]: 22)

Awal kejatuhan manusia adalah hilangnya rasa malu dalam dirinya. Jika melakukan yang menyerupai sifat tikus, kerjanya merusak sistem, melanggar aturan, mengacaukan kehidupan, mengusung konflik, mengumbar aib sendiri melalui tindak pidana korupsi atau pelanggaran lainnya, di saat itulah manusia jatuh harga diri dan derajat kemanusiaannya. Jika ia tidak melakukan hal-hal yang mengangkat nilai dan derajat kemanusiaannya, ia bagaikan tikus (hama tanaman).

Dari aspek agama dan budaya, nilai *siri'* yang berkonotasi positif harus ditegakkan, sehingga tatanan kehidupan masyarakat yang bermartabat. *Siri'* adalah harga diri, martabat, bahkan *siri'* itu adalah bagian dari iman.³⁴

Buah dari rasa malu adalah menjaga kehormatan (*‘iffah*) menjaga kehormatan). Setiap orang yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalannya, niscaya ia akan berlaku menjaga *‘iffah*. Selain *‘iffah*, malu membuat seseorang bersifat *wafa'* (setia dan menepati janji). Malu akan memperkuat keteguhan (*agettengeng*) seseorang menjadi *wara'* (*manini*). Sifat-sifat itu tumbuh dari kedalaman batin yang diisi dengan iman dan takwa kepada Allah. Itu sebabnya, *siri'* (malu) disebut bagian dari bukti keimanan.

Kesimpulan

Pencegahan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap konstitusi atau aturan dan perundangan negara demi terciptanya pemerintahan yang *good governance* tidak semata-mata dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian tata kelola birokrasi, melainkan juga melalui perbaikan tatanan sosial dan optimalisasi peran rumah tangga, perbaikan sistem pendidikan dan reorientasinya yang menekankan pada pendidikan nilai yang bersumber dari agama dan nilai kebudayaan yang sejalan dengan tuntunan al-Qur'an. Hal itu dikarenakan perubahan yang efektif hanya bisa

³³Lihat, QS. al-Nās [114]: 1-6.

³⁴ Hadis ini terdapat pada beberapa kitab hadis antara lain: Al-Bukhāri dalam *Bāb Imān*, no. 3; Muslim dalam *Bāb Imān*, no. 57 dan 58; Abū Dāwud dalam *Bāb Sunnah*, no. 14; Tirmidzi pada *Bāb Imān*, no 6; Nasā'ī pada *Bāb Imān*, no. 16; Ibn Mājah dalam *Bāb Muqoddimah*, no. 9; Ahmad bin Hanbal, no 2, 379, 414, dan 440. Lihat, A. J.

Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawi*, j. 1 (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 109. Teks hadis:

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأُذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

terjadi apabila dimulai dari internalisasi nilai-nilai luhur kedalam kesadaran diri manusia. Ikhtiar mengubah pola pikir dan kesadaran dimulai dari pendidikan baik secara informal, formal, maupun non-formal. Nilai-nilai ajaran Islam berupa kebaikan dan kebenaran tidak disangsikan lagi sebagai kebenaran universal yang bersumber dari Tuhan, sehingga menjadi kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. al-Qur'an mengisyaratkan bahwa penanaman nilai-nilai kebaikan dan kebenaran merupakan ranah afektif sebagai bagian integral dalam pendidikan dan birokrasi yang menjadi kunci untuk membangun karakter masyarakat dan bangsa. Dalam rangka mengatasi persoalan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran konstitusi lainnya dalam pengelolaan negara, pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai luhur kedalam jiwa peserta didik. Nilai-nilai kearifan lokal juga harus diperkenalkan dan ditanamkan dalam kesadaran peserta didik di lembaga pendidikan formal, di rumah tangga, dan di masyarakat, sehingga nilai-nilai luhur itu tetap eksis dan membudaya dalam prilakunya. Kearifan lokal berupa *lempu'* (kejujuran), *amaccang* (kearifan dan kecendikiaan), *asitinajang* (keputusan), *agettengeng* (keteguhan), *reso* (usaha atau kerja sungguh-sungguh), dan *siri'* (malu), adalah bentuk *al-'urf*, sebab nilai-nilai tersebut sejalan dengan petunjuk al-Qur'an. Karena sejalan dengan al-Qur'an maka nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat lokal melainkan bersifat universal sebab al-Qur'an merupakan *hudan li al-nās* (petunjuk bagi manusia). Nilai-nilai kearifan lokal tersebut dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Hal inilah yang menjadikan nilai-nilai dan kebijaksanaan lokal budaya semakin urgen untuk diajarkan dan dihayati serta diamalkan dalam masyarakat serta diusung ke ranah global dalam mengatasi carut marutnya kehidupan. Nilai-nilai tersebut juga tidak disangsikan lagi sebagai nilai-nilai yang relevan dan diperintahkan oleh al-Qur'an.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis-Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Dayu, 1985.
- Abdullah, Amin. "Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas." *Jurnal Pendidikan Lentera*, Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar, 1998.
- Bakti, Andi Faisal. "Kita Harus Menghormati Local Value", *Khazanah Islam Nusantara: Rekam Jejak Dialektika Islam dan Local Value*." *Jurnal Bimas Islam* 2, no. 1 (2009).
- Bitar. "Sejarah Suku Bugis, Rumah Adat, Bahasa, Kebudayaan & Kesenian." Diakses pada 10 Desember 2017. <https://www.gurupendidikan.co.id/suku-bugis/>.
- Hanbali, Ibnu Rajab. *Tazkiyatun Nafs: Konsep Pensucian Jiwa Menurut Ulama Salafusshalih*. Solo: Pustaka Arafah, 2004.
- "Ketika Rakyat Tak Lagi Percaya Perilaku Elit Politik." *Berdikari Online*, 8 Juli, 2013. Diakses pada 10 Desember 2017. <https://www.berdikarionline.com/ketika-rakyat-tak-lagi-percaya-perilaku-elit-politik/>.
- Lari, Sayyid Mujtaba Musawi. *Teologi Islam Syi'ah*. Diterjemahkan oleh Tholib Anis. Jakarta: al-Huda, 2014.
- Machmud, A Hasan. *Silasa: Kumpulan Petuah Bugis-Makassar*. Jakarta: Saudagar, 2000.
- Mattulada, "Sulawesi Selatan Pra Islam." *Buletin Yaperna* 12, no. 3, (1976).
- , "Latoa: Suatu Lukisan terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis."

- Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- Muhaimin, dkk. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Mursalim, "Tafsir Bahasa Bugis/Tafsir al-Qur'an al-Karim Karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan: Kajian terhadap Pemikiran-Pemikirannya." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abud, dkk. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEQ, 2005.
- Rahim, A. Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Santing, Waspada, dkk. *Refleksi 75 Tahun Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah; Meneguhkan Eksistensi Alauddin*. Makassar: Pustaka al-Zikra, 2010.
- Sayyid Qutub. *Al-Islām wa Musykilat al-Hadharah*. Kairo: Dār al-Syuruq, 1993.
- Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwat al-Tafāsīr*. Kairo: Dar al-Shabuni, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- , "Pendidikan Nilai untuk Pembentukan Sikap dan Perilaku." *Jurnal Pendidikan Lentera*, (1997).
- Sultan, Muhammad Sayyid. *Buhuth fī al-Tarbiyah fī al-Tarbiyah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1979.
- Tim Penyusun. *Mengembangkan Budaya Kerja Melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama*. Jakarta: Itjen Kementerian Agama RI, 2011.
- Wensinck, A. J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Ḥadīs al-Nabawi*. Leiden: Maktabah Brill, 1936.